



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 807/III/2014

III/MARET 2014



DPR Minta Hakim Terpilih Tingkatkan Citra dan Wibawa MK

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id dan tvparlemen.com

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MARET 2014

Minggu ketiga bulan Maret 2014, berisi laporan intisari atas kegiatan rapat Paripurna tanggal 6 Maret 2014 mengenai persetujuan atas Calon dua Hakim Konstitusi, Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai Rancangan Anggaran DPR RI 2015 dan pidato penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 - 2014.

Rapat Paripurna tanggal 6 Maret 2014

Rapat Paripurna ini memiliki 4 agenda yaitu: (1) Pengambilan keputusan terhadap Laporan Komisi IV mengenai Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; (2) Laporan Komisi III dilanjutkan Pengambilan Keputusan Calon Pengganti Hakim Konstitusi; (3) Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dan pengambilan keputusan mengenai Rancangan Anggaran DPR RI 2015; (4) pidato penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 - 2014.

Sebelum sampai agenda pertama, ketua rapat wakil ketua DPR bidang Industri Pembangunan melaporkan bahwa dua anggota baru DPR Pengganti Antar Waktu telah diambil sumpahnya, yaitu: (1) Drs. H. Mohammad Aly Yahya dari Golkar menggantikan Drs. H. Hikmat Tomet, M.M dan (2) Drs. H. Bambang Suryadi dari PDIP menggantikan H.M. Taufik Kiemas.

Selanjutnya ketua rapat juga melaporkan telah diterima surat dari Presiden RI tertanggal 27 Februari 2014 perihal 22 (dua puluh dua) RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang akan ditindak lanjuti melalui keputusan Bamus DPR RI.

Ketua rapat juga melaporkan adanya surat masuk dari beberapa Alat Kelengkapan Dewan mengenai permintaan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 28 RUU. Mengingat perpanjangan waktu pembahasan terhadap ke 28 RUU telah melebihi dua kali masa sidang, maka Rapat Paripurna pada akhirnya memberikan persetujuan terhadap permintaan perpanjangan tersebut. Kedua puluh delapan RUU tersebut adalah RUU yang datang dari inisiatif DPR maupun

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



RUU dari Pemerintah yang telah memasuki pembicaraan tingkat I bahkan telah dibahas dalam Tingkat Panja, baik di Komisi maupun di Panitia Khusus (Pansus). Pada Masa sidang yang akan datang, pembahasan kedua puluh delapan RUU tersebut akan dilanjutkan.

Memasuki agenda pertama Rapat Paripurna, yaitu pengambilan keputusan terhadap Laporan Komisi IV mengenai Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Akhirnya diputuskan bahwa permasalahan ini dikembalikan kepada Komisi IV untuk dibahas kembali dan diambil keputusan, tanpa dibawa lagi ke Paripurna DPR.

Pada agenda kedua Rapat Paripurna, lebih dahulu mendengar Laporan Komisi III dilanjutkan pengambilan keputusan tentang Calon Pengganti Hakim Konstitusi.

Setelah Paripurna mendengar laporan komisi III mengenai hasil *fit and proper test* terhadap calon-calon Hakim Konstitusi, maka melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, komisi III menetapkan dua calon pengganti Hakim Konstitusi yaitu : (1) Dr. Wahidudin Adam, S.H, M.H dan (2) Dr. Aswanto, S.H, M.Si. untuk mengisi kekosongan dua Hakim Konstitusi. Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas calon-calon tersebut dan kemudian di perkenalkan oleh pimpinan sidang.

Pada agenda ketiga rapat Paripurna; Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai Rancangan Anggaran DPR RI 2015, telah disampaikan oleh wakil ketua BURT Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, S.H. M.H. Dalam laporannya disebutkan bahwa: BURT telah menyusun Rancangan Anggaran 2015 bersama AKD dan Setjen. Penyusunan anggaran 2015 mengacu pada arah kebijakan umum penge-



lolaan Anggaran DPR RI tahun 2015, sesuai Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib, pasal 87 ayat 1 huruf a, b dan d. Atas usulan kebutuhan anggaran tahun 2005 dari seluruh AKD dan Sekretariat Jendral selanjutnya dilakukan kompilasi dan sinkronisasi serta pembahasan dengan Sekretariat Jendral.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dan sesuai Tata Tertib, BURT menyampaikan Rancangan Kegiatan dan Anggaran DPR RI Tahun 2015 sebesar Rp. 3.969.285.987.000,- (Tiga Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), naik sebesar 22,13% apabila dibandingkan dengan DIPA Tahun 2014 sebesar Rp. 3.250.069.725.000,- (Tiga Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Bahwa besaran Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2015 ini hanya 0,21 persen dari Belanja negara dalam APBN Tahun 2014.

Rancangan anggaran DPR RI ini terbagi kedalam anggaran Satuan Kerja Dewan sebesar Rp. 2.889.448.030.000,- (Dua Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Satuan Kerja Sekretariat Jendral sebesar Rp. 1.079.837.957.000,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Agenda keempat Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 – 2014, adalah pidato Ketua DPR RI. Diawal pidatonya, Ketua DPR mengatakan bahwa tanggal 7 Maret sampai dengan 11 Mei DPR RI menjalani masa reses Persidangan ke III tahun sidang 2013 – 2014. Pimpinan berharap, pada Masa Persidangan IV yang akan dibuka pada 12 Mei 2014, para anggota DPR dapat kembali melanjutkan tugas-tugas konstitusional, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPR. Diperlukan semangat dan kerja keras agar pelaksanaan fungsi-fungsi utama DPR dapat berjalan optimal, efektif dan efisien. Cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum DPR mengakhiri masa bakti pada 30 September yang akan datang, tidak hanya dalam penyelesaian produk perundang-undangan, tetapi juga dalam proses anggaran yang ditangani selama Masa Sidang IV, dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015.

Di bidang Legislasi ketua DPR RI melaporkan bahwa : Selama Masa Persidangan III ini, Dewan telah menuntaskan 5 (lima) RUU yang terdiri dari: 2 (dua) RUU prioritas, yaitu RUU tentang Keinsinyuran dan RUU tentang Perdagangan, serta 3 (tiga) RUU kumulatif terbuka, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa 2005.

Di bidang Anggaran Ketua mengatakan bahwa : Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Ketua DPR mengatakan bahwa, tahun 2014 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014. Dalam konteks kesinambungan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 menjadi basis yang penting bagi proses transisi ke tahap pembangunan berikutnya, yaitu RPJMN 2015-2019. RAPBN 2015 yang merupakan tahapan implementasi tahun pertama RPJMN 2015-2019, akan dibahas oleh DPR periode ini. Pada masa sidang ini Badan Anggaran bersama Pemerintah, telah menyepakati agenda pembahasan RAPBN, khususnya APBN 2015 yang akan diselesaikan pada akhir September 2014 atau lebih cepat satu bulan dari agenda normal. Oleh karena itu, Komisi bersama pasangan kerjanya masing-masing agar dapat menyesuaikan dalam pembahasan RKAKL.

Di bidang Pengawasan, Ketua DPR melaporkan kegiatan Tim-tim Pengawas yang telah dibentuk DPR antara lain Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tim Pemantau DPR RI Mengenai Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yang masih terus melanjutkan pemantauannya. Tim meminta Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan yang sangat di perlukan dalam rangka penyelesaian program peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ketua juga melaporkan kegiatan Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century. Tim Pengawas terus melanjutkan kegiatannya mengawal dan memonitor penyelesaian yang telah dan sedang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum seperti KPK. Ketua juga melaporkan kegiatan beberapa Alat Kelengkapan Dewan / Komisi – komisi antara lain Komisi VIII yang telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama untuk membahas BPIH tahun 1435 H/2014 M. Disepakati bahwa BPIH tahun 1435 H/2014 M adalah rata-rata sebesar USD 3.219 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Dolar Amerika) atau turun sebesar USD 308 (Tiga Ratus Delapan Dolar Amerika) dari tahun 1434 H/2013 M yaitu sebesar USD 3.527 (Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika).

Komisi IX DPR juga telah melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, dengan agenda Penjelasan Pemerintah terhadap perkembangan pelaksanaan rekomendasi Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX. Hasil rapat menyimpulkan antara lain, baik Menteri BUMN maupun Komisi IX sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN per-tanggal 5 Maret 2014. Komisi IX, Menteri BUMN dan Menakertrans, menyepakati untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari kedua kementerian, untuk melaksanakan rekomendasi Panja *Outsourcing* Komisi IX selambat-lambatnya 12 Maret 2014.

Beberapa kegiatan dalam rangka diplomasi Parlemen juga telah dilaporkan oleh Ketua DPR dalam pidatonya.

Pada akhir pidato ketua meminta perhatian kepada segenap anggota dewan perihal pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Adapun harapan ketua DPR sebagai berikut : “Besok pagi DPR memasuki masa reses. Sebagian besar anggota Dewan yang mencalonkan kembali, saya yakin, akan memaksimalkan masa reses menjelang Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014. Kita berharap, agar Pemilu berjalan aman dan lancar. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, dimana calon legislatif dan rakyat bersama-sama berperan dalam membangun demokrasi”.

“Pemilu Legislatif yang akan berlangsung berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan berbagai peraturan lainnya yang dikeluarkan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, Pimpinan Dewan berharap, agar semua peserta dan Calon Legislatif mem-

perhatikan berbagai peraturan, dengan tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan, tidak memunculkan isu SARA, dan tidak melakukan provokasi yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa”.

“Dewan juga memperhatikan peringatan Bawaslu, bahwa kerawanan pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, adalah adanya potensi pencurian suara. Dewan mendorong agar Bawaslu terus menyempurnakan pemetaan dengan membangun tabulasi berbasis harian untuk semua TPS”. “Disisi lain, tingkat golput perlu diminimalisir. Rakyat harus diberikan pemahaman yang benar, bahwa dengan berpartisipasi memilih dalam Pemilu, mereka akan dapat ikut menentukan masa depan bangsa”.

Demikian intisari pidato Ketua.

DPR Minta Hakim Terpilih Tingkatkan Citra dan Wibawa MK



Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli menyampaikan laporan hasil fit and proper test calon Hakim Konstitusi kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Rapat Paripurna DPR RI menerima secara aklamasi laporan Komisi III tentang hasil seleksi calon Hakim Konstitusi. 2 hakim terpilih memiliki beban berat terutama meningkatkan citra dan wibawa mahkamah yang tercoreng dengan kasus yang melibatkan mantan Ketua MK M. Akil Mochtar.

“Diharapkan calon hakim terpilih dapat menjadi Hakim Konstitusi yang mampu meningkatkan citra dan wibawa MK sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus pengawal Konstitusi,” kata Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli saat

menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/14).

Secara khusus ia menyampaikan apresiasi kepada 9 orang Tim Pakar yang selama 3 hari berturut-turut mendampingi Komisi III melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 11 kandidat dan memberikan rekomendasi. Dari 4 calon hakim yang disampaikan Tim Pakar, 2 orang terpilih dalam pleno komisi yang membidangi masalah hukum ini.



Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA mantan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh 46 suara dan Prof. Dr. Aswanto, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, Sulsel dengan 23 suara.

Dua Hakim Konstitusi terpilih dalam kesempatan itu diperkenalkan langsung oleh Pimpinan Sidang Paripurna Pramono Anung kepada seluruh peserta rapat. Tepuk tangan penghormatan disampaikan anggota dewan membalas

salam yang diberikan dari podium.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf mengingatkan agar kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua MK dapat menjadi pelajaran bagi Hakim MK terpilih. “Selamat bekerja, berikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kasus Akil Mochtar harusnya jadi pelajaran bagi mereka, kalau tidak saya tidak mengerti apa lagi yang bisa menyadarkan mereka,” demikian Muzammil. *(iky)/foto:iwan armanias/parle.*

Perlu Terobosan Untuk Selesaikan Utang Jamkesmas

Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno menegaskan perlunya upaya terobosan untuk menyelesaikan utang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada sejumlah rumah sakit termasuk RSUD. Ia mengikuti rapat di Jatim, semua RSUD mengaku pusing. Utang Jamkesmas kepada RSUD harus dibayar bulan Maret ini, kalau tidak bisa semampai (pingsan).

“Namun mereka tetap ragu, bulan Maret ini bisa membayar, apalagi jumlahnya semula utang 1,8 triliun, kini sudah mencapai 2,8 triliun rupiah,” ungkapnya saat memimpin pertemuan Tim kunjungan kerja Komisi IX DPR dengan Wagub DIY Sri Paku Alam IX di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Keraton Yogyakarta, Senin (10.3).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, Jamkesmas merupakan program pemerintah, BPJS Kesehatan program kita semua, bisa gagal gara-gara utang Jamkesmas kepada RSUD tidak dibayar, hanya karena masalah birokrasi. Untuk itu, Komisi IX nanti akan memanggil kembali Kemenkes dan BPJS Kesehatan serta Kemenkeu untuk merumuskan terobosan penyelesaian utang Jamkesmas.

Dikemukakannya, untuk menyelesaikan utang tersebut perlu dibicarakan secara internal, yang penting bisa dipertanggungjawabkan, apakah dibayar 50% dulu. Berdasarkan informasi hal itu sudah diverifikasi, sehingga Jamsostek pasti akan bertanggungjawab. Jangan sampai karena masih utang, lalu mengganggu keuangan RSUD yang menjadi mitra BPJS. Segera ambil keputusan, kalau perlu lapor BPK bagaimana ini penyelesaiannya supaya aman.

“Kalau terus terkatung-katung begini, kasihan RSUD, gara-gara hanya masalah birokrasi, padahal penyelesaian soal aset ini sudah selesai sebelum dimulainya program JKN melalui BPJS awal Januari 2014,” tegasnya.

Anggota Komisi IX Martri Agoeng mengatakan, sebenarnya masalah tersebut menyangkut keuangan korporasi antara PT Askes dan Jamsostek sehingga tidak bisa dipatok akhir tahun selesai. Amanahnya untuk menyelesaikan masalah itu melalui RUPS, karena keduanya merupakan perusahaan.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno berdialog dengan Wagub DIY Sri Paku Alam IX.

Dia menyatakan setuju atas usul Pimpinan Komisi IX, kalau perlu dibawa ke tingkat Pimpinan DPR dan meminta kepada BPK untuk mendampingi, sebab mereka tidak berani untuk menerobos itu. “Mereka harus tunduk pada aturan sebelumnya sebagai sebuah perusahaan, tetapi ada kendala di lapangan sehingga merepotkan pelaksanaan program BPJS,” kilahnya.

Sependapat dengan Soepriyatno, perlu ada terobosan, kalau ada temuan seperti ini, Pimpinan Komisi menyampaikan kepada Pimpinan DPR untuk memanggil Pimpinan BPK menyelesaikan masalah ini. “BPJS merupakan program nasional bisa babak belur, gara-gara terjadi masalah yang tidak bisa diterabas. Kalau perlu ikutsertakan KPK, terkait dengan pencegahan,” ungkapnya.

Ditambahkan Martri, temuan ini bagus bagi Komisi IX selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Dewan sesegera mungkin bisa dicari jalan keluarnya. Programnya bagus, tetapi tidak berjalan mulus karena keterlambatan penyiapan dalam antisipasi implementasi.

Supriyatno menambahkan, masalah tersebut tidak terlalu sulit untuk diselesaikan, karena sudah diverifikasi oleh PT. Jamsostek sehingga tinggal terobosan di pembayarannya saja, dan bila dibicarakan dengan BPK maka akan selesai

masalahnya. “Bukan persoalan tanggungjawabnya, tetapi beban RSUD yang perlu segera diatasi,” ia menambahkan.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Yusherman mengatakan, keterlambatan pembayaran

utang Jamkesmas karena menunggu audit BPK, yang hingga kini sudah mencapai 50%.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, dari jumlah penduduk 3.706.798 jiwa sebanyak 3.238.067 sudah tercover sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jumlah ini merupakan

kemajuan pesat pada awalnya hanya terdaftar 2.068.188 jiwa. Sebanyak 408.000 jiwa yang belum tercover, dan secara bertahap akan ditransformasi kepesertaannya, sehingga pada tahun 2016 semua sudah tercakup dalam BPJS Kesehatan di seluruh wilayah DIY.

(mp) Foto: mastur/parle/iw.

Komisi III Pantau Keamanan Jelang Pemilu di Sulteng



Ketua Tim Kunker Komisi III DPR AI Muzammil Yusuf berdialog dengan Sekda Prov. Sulawesi Tengah.

Komisi III DPR RI memberikan perhatian pada persiapan pengamanan Pemilu Legislatif di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebagai satu dari 7 daerah yang masuk kategori rawan, sejumlah langkah perlu dilakukan agar provinsi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Filipina ini dapat melewati pesta demokrasi dengan stabil.

“Jelas stabilitas di Sulteng ini penting dan tentu juga mempengaruhi kondisi nasional. Apalagi kalau kita tarik garis provinsi ini persis berada di tengah wilayah Indonesia,” kata Ketua Tim Kunker Komisi III AI Muzammil Yusuf usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulteng di Palu, Selasa (11/3).

Ia berharap walaupun anggaran pengamanan pemilu

yang diajukan Polri sebesar Rp 3 triliun tidak sepenuhnya dapat dipenuhi, upaya pengamanan tidak kendor. Pemerintah Daerah menurutnya dapat memberikan dukungan dan bekerja sama dalam sejumlah program yang ada.

Anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding meminta Pemprov mengefektifkan pengamanan tertutup yang melibatkan camat, lurah sampai kepada Pengurus RT. Ia juga mengingatkan keterlibatan mereka hendaknya tetap memperhatikan netralitas.

“Pengamanan tertutup ini mudah-mudahan bisa dilakukan secara independen tanpa kehilangan netralitas. Sebenarnya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia adalah tanggung jawab kita bersama,” tekannya.

Secara khusus ia meminta Pemprov memberikan perhatian pada pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan aksi teror pesanan. “Ada kondisi yang dibuat sedemikian rupa, tidak murni benar orang yang melakukan aksi teror adalah teroris, ini perlu ditelusuri,” lanjut wakil rakyat dari Dapil Sulteng ini.

Menjawab hal ini, Sekda Provinsi Sulteng Amdjad Lawasa menjelaskan sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian dan aparat intelejen untuk melakukan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan aksi teror. Dalam apel besar pengamanan pemilu menurutnya gubernur juga sudah meminta seluruh aparat negara yang terlibat dapat bersikap netral. “Kami menyambut kedatangan Tim Kunker Komisi III, masukan yang kita peroleh akan kita sampaikan dalam forum koordinasi daerah,” ujar dia. (iky) Foto:ical/parle.

Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan Ruas Jalan Timika - Waghete

Komisi V DPR RI mendukung percepatan Pembangunan ruas jalan strategis nasional Timika-Waghete dengan panjang total 143.510 kilometer (km), untuk membuka daerah-daerah terisolir dan memacu peme-

rataan pembangunan infrastruktur di Wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua.

Wakil Ketua Komisi V Michael Wagtmina (FPD) mengatakan hal itu

dimaksudkan untuk menekan tingkat kemahalan harga-harga barang pokok di Wilayah Pegunungan Tengah karena distribusi barang nantinya dapat dilakukan melalui transportasi darat sehingga biaya operasional lebih mu-



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena meninjau pelaksanaan penanganan ruas jalan Timika - Waghete.

rah jika dibandingkan dengan menggunakan transportasi udara.

“Adanya ruas jalan yang melewati daerah-daerah terisolir akan membuka akses bagi kemajuan pendidikan

maupun kemajuan teknologi di daerah tersebut,” tegas Michael Wattimena. Saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 di Provinsi Papua, Senin (10/3).

Ikut serta Anggota Komisi V Etha Bulu (F-PD), Sonny Waplau (F-Pd), Hetifah, Eriko Sotarduga (FPDIP), Sadares-tuwati (F-PDIP), Yudi Widiana (FPKS), Abdul Hakim (F-PKS).

Komisi V mendapatkan kondisi jalan dalam penanganan ruas Timika Waghete, yaitu jalan yang telah terbuka 121,220 km, jalan yang sudah diaspal dengan komposisi *tailing* 64,400 km, jalan tanah dengan menggunakan timbunan pilihan 56,820 km, dan jalan yang belum terbuka masih hutan 22,290 km.

Patut diketahui, berdasarkan sumber Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah VI Provinsi Papua (Timika) menangani 2 ruas jalan yaitu Ruas jalan Nasional Timika-Mapuruja-ya-Pomako sepanjang 42,354 km dan Ruas Jalan Strategis Nasional Timika Waghete dengan Panjang 143,510 km. (as) Foto:agung/parle.

Komisi X Tantang Kalteng Deklarasikan Bebas Buta Aksara

Komisi X DPR RI menantang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk berani mendeklarasikan bebas buta aksara atau tidak bisa membaca di daerah tersebut. Hal ini disampaikan anggota Komisi X Nurul Qomar usai meninjau SDN 11 Langkai, SMPN 2, SMAN 1 dan SMKN 3 Palangka Raya, Senin (10/3).

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto, Tim Kunjungan Kerja diterima Wakil Gubernur Achmad Diran serta Pejabat Pemprov Kalimantan Tengah.

Qomar mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), penyandang buta aksara di Indonesia dinilai sangat tinggi dan Provinsi Kalteng merupakan salah satu dari 10 provinsi yang dinilai masih tinggi buta aksara.

Menurut Anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini, deklarasi bebas buta aksara sangat diperlukan dalam upaya mempercepat daerah ini terbebas dari buta aksara. Dia juga meminta Pemprov Kalteng untuk mengecek kebenaran data jumlah masyarakat buta aksara.

“Sebab menurut BPS setempat hanya satu persen, apakah survey yang telah dilakukan BPS melalui *sampling* atau acak, sehingga bisa saja jumlah satu persen berbeda dengan kondisi di lapangan, maka perlu dilakukan pamban-



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto didampingi Anggota Komisi X berdialog dengan jajaran Pemprov. Kalteng.

ding melalui nama, alamat dan foto,” kata Qomar.

Qomar berharap, program bebas buta aksara ini bisa tercapai sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran.

“Bebas buta aksara itu sangat baik bagi psikologi maupun politik kepemimpinan Teras-Diran. Hal itulah kenapa saya sarankan agar dapat dituntaskan sebelum berakhirnya masa kepemimpinan di Kalteng,” tegas Qomar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalteng Damber Liwan menyatakan, belum dapat memastikan berapa jumlah buta aksara di Provinsi Kalteng, dan Pemprov Kalteng pun sedang berupaya menuntaskan buta aksara dengan bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya menyusun berbagai program.

“Targetnya pada 2015 tahun depan, buta aksara tuntas di Kalteng. Kalau mengenai berapa jumlah penyandang buta aksara nanti akan kami berikan, tapi pada dasarnya sedang disusun strategi penuntasan buta aksara,” kata Damber. (hr)/foto:eka hindra/parle/iw.

Batas Desa Yang Tidak Jelas Sumber Konflik Agraria di Sumsel

Banyaknya daerah pemekaran di Sumatera Selatan (Sumsel) yang belum jelas batas antar desanya telah mengundang konflik agraria (pertanahan). Konflik tersebut semakin rumit ketika melibatkan dua perusahaan swasta yang mengklaim telah mendapat izin pemanfaatan lahan atas lahan yang sama dari dua pemerintahan kabupaten.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Sumsel Afrizal di Palembang, Senin (10/3). Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Sumsel Khatibul Umam Wiranu, mengatakan, konflik tanah biasanya agak rumit diselesaikan dan makan waktu lama pula penyelesaiannya.

Untuk itu, Komisi II telah merumuskan RUU Pertanahan yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan tersebut. Dalam RUU ini, ada polisi tanah yang nanti bertugas menjaga batas tanah dan memediasi setiap konflik agraria.

Kakanwil BPN Sumsel mengapresiasi RUU yang sedang dibahas Komisi II tersebut. Dengan RUU itu, BPN di seluruh Indonesia tidak *galau* lagi bekerja menyelesaikan konflik agraria.

Kakanwil BPN Sumsel menjelaskan, walaupun Komisi II DPR telah menetapkan batas wilayahnya dalam dokumen pemekaran, tapi ketika dicocokkan ke lokasi perbatasan, tetap saja tidak mendapat kejelasan, karena faktor alam dan klaim masing-masing pemerintah kabupaten. Untuk kasus seperti itu, Kanwil BPN Sumsel biasanya menetapkan lahan sengketa di perbatasan sebagai status *quo*, sampai ada penjelasan lebih lanjut dari panitia pemekaran dan Komisi II DPR.



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu didampingi Kakanwil BPN Sumsel.

Informasi lainnya yang didapat Tim Komisi II DPR adalah BPN Sumsel ternyata selalu kekurangan alat ukur dan juru ukur. Dari 4 juta hektar lebih luas bidang tanah di Sumsel, baru seperempatnya saja yang disertifikatkan. Kekurangan juru ukur jadi kendala tersendiri. Saat ini hanya ada 38 orang petugas juru ukur. Idealnya, kata Kakanwil BPN Sumsel, mesti ada 122 petugas juru ukur.

Bahkan, lanjut Kakanwil BPN, Kabupaten OKU Selatan belum memiliki kantor sendiri. Selama ini masih menyewa gedung. Melihat realitas tersebut, BPN Sumsel meminta Komisi II untuk memberi perhatian khusus pada BPN Sumsel.

Khatibul Umam menyatakan keprihatinannya. Bila kekurangan alat ukur dan juru ukur, BPN Sumsel tidak bisa bekerja optimal. Ini menjadi bekal informasi yang berharga untuk disampaikan kepada Kepala BPN pusat saat raker nanti. (mh) foto: husen/parle/iw.

Komisi V Dukung Pembangunan Bandara NTT

Komisi V DPR mendukung pembangunan Bandara di NTT, seperti pembangunan bandara baru pengganti Bandara El Tari Kupang, Bandara di Pulau Pantar, Kabupaten Alor serta pembangunan Bandara di Kabupaten Manggarai Timur.

“Dalam perencanaan sebanyak 14 bandara di NTT akan dibangun karena tidak semuanya sempurna,” ujar Ketua

Komisi V DPR Laurens Bahang Dama kepada wartawan di NTT, baru-baru ini.

Komisi V DPR, lanjutnya, meminta agar pembenahan tersebut dapat dituntaskan dalam tahun 2014. “Kita harapkan bandara di NTT bisa didarati pesawat dengan kapasitas minimum 50 *seat*,” katanya.

Dia menegaskan, Komisi V DPR terus berjuang di Pusat untuk pembangunan bandara di NTT. Dirinya menargetkan pada 2014 semua bandara di NTT segera diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya.

Terkait usulan pembangunan bandara di Pulau Pantar, Kabupaten Alor dan Manggarai Timur, dia mengatakan, masih dalam tahap pengujian oleh Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

“Masih dalam proses, khusus Bandara di Pulau Pantar masih dilakukan analisis mengenai Amdal dan diproses Kemenhub,” terangnya.

Kita mengharapkan pengembangan bandara Eltari dapat segera selesai. “Ini merupakan proyek Angkasa Pura, kita melihat standar pelayanan minimum jangan sampai ruang tunggu sempit sehingga pelayanan terabaikan,” ujarnya.

Laurens menambahkan, minimnya fasilitas, dan prasarana supaya dibenahi dan sudah ada imigrasi, paling tidak standar dasarnya sudah ada.

(si) Foto: sugeng/parle.



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengunjungi pembangunan bandara Eltari Kupang.

Komisi V Buktikan Komitmennya Bantu Manado Pasca Banjir

Komisi V DPR RI memastikan komitmennya dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pertengahan Januari 2014 lalu di Kota Manado.

Komitmen ini disampaikan Ketua Tim kunjungan kerja Komisi V DPR Muhidin M Said saat pertemuan dengan Pemprov Sulut yang dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil, serta unsur pejabat terkait, Senin (10/3) di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.

“Akibat banjir tersebut banyak infrastruktur pemerintah maupun masyarakat rusak parah. Karena itu kedatangan kali kedua kami ke Sulut. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kerja kami kepada warga Sulut, dimana waktu kunjungan pada Februari 2014 lalu, kami telah menerima usulan Pemprov. Sulut terkait dengan kerusakan infrastruktur,” kata Muhidin.

Pada kunjungan kerja reses dalam masa persidangan III tahun sidang 2013-2014 ini, tim melakukan peninjauan transportasi Sulut dengan melintasi jalan nasional yang dilanjutkan peninjauan jalan alternatif Manado-Tomohon, sekaligus peninjauan lapangan pemulihan infrastruktur pasca musibah longsor di Manado.



Ketua Tim kunker Komisi V DPR Muhidin M Said saat pertemuan dengan Pemprov. Sulut.

Wakil Gubernur Djouhari Kansil dalam kesempatan tersebut mengapresiasi perjuangan Komisi V yang telah memberikan perhatian besar membantu Pemprov. Sulut dan Pemkot Manado, dalam memasuki masa transisi pasca bencana untuk pemulihan.

Menurut Kansil, agenda utama pemerintah dititikberatkan pada pembangunan kembali infrastruktur, terutama fasilitas publik maupun utilitas yang rusak akibat bencana seperti jalan, jembatan, saluran air, gedung kantor serta infrastruktur yang lain. (ray) foto: rizka/parle.

GOPAC Indonesia Dorong Sistem Yang Lebih Fair Gerus Korupsi

Global organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) Indonesia menginginkan sistem yang lebih fair dalam konteks kesetaraan gender di Indonesia. Sistem yang lebih *fair* akan memberikan ruang dan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.



Anggota GOPAC Indonesia Nurhayati Ali Assegaf.

“Peran perempuan dalam aspek pemberantasan korupsi cukup penting. Tetapi ini hanya dapat berpengaruh bila sistem politik menjadi lebih *fair* dalam hal peran keterlibatan perempuan dalam politik maupun pengambilan keputusan,” tutur Nurhayati Ali Assegaf, anggota GOPAC Indonesia, yang juga sebagai anggota *Global Task Force*

on Participation of Society di GOPAC.

Meski demikian, sambung Eva Kusuma Sundari, anggota GOPAC Indonesia yang lain, hal ini bukan berarti hanya bicara soal angka alias jumlah perempuan yang duduk di politik. Ini adalah konteks sistem yang lebih fair yang dalam konteks ini berarti berbicara mengenai terbukanya peluang wanita duduk dalam posisi-posisi penting, adanya sistem demokrasi mapan, hingga jaminan kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum yang kuat.

Berkaca dalam sidang umum *South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* yang digelar di Medan tahun lalu, Eva menuturkan bahwa korupsi bukan soal gender, tetapi kultur. “Untuk menanganinya, selain membuka keterlibatan perempuan secara lebih luas, negara harus konsisten menegakkan hukum dan demokrasi,” tegas Eva.

Kedua anggota GOPAC Indonesia tersebut merespon positif publikasi GOPAC mengenai *Gender Equality in Parliaments and Political Corruption* yang diantaranya merekomendasikan keterlibatan perempuan secara luas di dalam politik termasuk dengan menciptakan sayap perempuan di

partai politik, merevisi AD/ART Partai Politik untuk mengakomodasi peran perempuan, membentuk komite kesetaraan di parlemen hingga sistem yang membuka kesempatan seimbang bagi perempuan dan laki-laki untuk duduk dalam posisi pengambil keputusan. Keduanya tetap yakin, bahwa peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan di parlemen akan berimbas positif pada gerakan pemberantasan korupsi.

Dalam publikasi tersebut, GOPAC juga menandakan bahwa kesetaraan gender harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan di parlemen hingga berkolaborasi dengan organisasi internasional dan madani untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi berikutnya.

GOPAC adalah organisasi anggota parlemen dunia berbasis di Kanada dengan fokus utama pada pemberantasan korupsi. GOPAC hingga saat ini memiliki 50 cabang di lima benua. GOPAC Indonesia merupakan salah satu bagian dari GOPAC di level internasional. Saat ini Ketua GOPAC Indonesia atau yang juga disebut dengan Gugus Tugas DPR anti-korupsi adalah Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. (Tim) foto:iwan armanias/parle.

Serap Aspirasi, DPR Kunjungi Jambi

Dalam rangka reses masa persidangan III, Komisi VIII mengunjungi Provinsi Jambi. Kunjungan ini dalam rangka menyerap berbagai aspirasi dari jajaran *stakeholder* di provinsi beribukota di Jambi ini.

“Pertemuan ini tentu saja sangat penting. Karena melalui pertemuan ini, kita dapat meningkatkan tali silaturahmi dan komunikasi antara masyarakat para pejabat di Provinsi Jambi dengan Legislatif,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria, yang sekaligus memimpin tim kunjungan kerja, di Kantor Gubernur Jambi, Jumat (7/03).



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria didampingi Wagub. Jambi.

Selain itu, tambah Sayed, dalam kunjungan ini Komisi VIII juga ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan pembangunan dalam bidang agama di Jambi, kondisi koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan bidang agama, serta kendala dalam implementasinya. Hal serupa juga terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, serta penanggulangan bencana.

“Kita berharap, semoga melalui pertemuan ini kita semua dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam melahirkan pemikiran yang produktif

dan kreatif guna melanjutkan proses pembangunan Jambi khususnya dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” jelas Sayed.

Anggota tim kunjungan kerja Komisi VIII ini adalah Anggota Komisi VIII Yunus Roichan, Yetti Heryati, Sholeh Soeady, Ahmad Rifai Suftiadi, Humaidi, Idris Lena, Adang Ruchiatna Pura-diredja, Manuel Kaisepo, Abdul Rozaq Rais, dan Sumarjati Arjoso.

Salurkan Bantuan

Pada kunjungan kerja ini, Komisi VIII juga menyerahkan beberapa bantuan, diantaranya untuk asistensi sosial orang dengan kecacatan berat sebesar Rp 2,5 miliar. Bantuan asistensi lanjut usia senilai Rp 1,4 miliar, dan lembaga kesejahteraan sosial sebesar Rp 1,5 miliar.

Bantuan juga diberikan kepada 40 industri rumah tangga untuk sertifikasi produk halal, serta instansi lain di Jambi yang merupakan mitra dari Komisi VIII. (sf) foto: sofyan/parle.

Komisi VIII Apresiasi Kerukunan Umat Beragama Kalbar

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerukunan hidup umat beragama di Propinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerjanya ke Kalbar, Senin (10/3).

“Tujuan kunjungan kami ke Kalimantan Barat ini sebenarnya lebih kepada fungsi pengawasan yang kami emban. Kami ingin mengetahui pelaksanaan program-program yang telah dijalankan mitra kerja Komisi VIII, sejauh ini sudah seperti apa,” jelas Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah yang memimpin rombongan.

Ida melanjutkan, salah satu yang ingin ia ketahui adalah potensi kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat, yang salah satunya menjadi tugas dan wewenang dari Kementerian agama sebagai salah satu mitra kerja Komisi VIII.

Mendengar penjelasan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya yang menyambut Komisi VIII mengatakan, bahwa sejauh ini Kalbar tidak memiliki permasalahan yang terkait dengan kerukunan umat beragama.

“Bahkan kami sering dijadikan contoh kerukunan umat beragama di propinsi lainnya, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Yogyakarta,” ungkap Christiandy Sanjaya.

Ditambahkannya, pada tahun 2009 beberapa pemuda



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah menyerahkan bantuan Kemensos kepada Wakil Gubernur Kalbar.

mengikuti dialog dan kunjungan pemuda lintas agama di Pontianak yang diadakan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag RI), bahkan dari ajang tersebut terbentuklah forum komunikasi pemuda lintas agama (Forkopelia).

Dari ajang tersebut terciptalah pelopor kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Bahkan sebagai Ketua Dewan Kerukunan Umat Beragama, Christiandy juga mengalokasikan anggaran khusus sebesar 30 juta rupiah untuk Kabupaten/Kota se Kalbar, yang diambil dari DIPA Kemenag masing-masing Kabupaten/Kota. (Ayu) foto: ayu/parle.

Incar Sekjen IPU, Italia Minta Dukungan DPR

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Surahman Hidayat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Italia untuk Indonesia, Federico Failla. Kedatangannya dalam rangka menyampaikan keinginan

negara itu untuk menduduki kursi Sekjen IPU (Inter Parliamentary Union).

“Kita menyambut baik apabila Senator Barbara di-



Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat menerima Dubes Italia Federico Failla.

calonkan Italia, kita akan mempelajari. Keunggulan dan pengalamannya tentu akan jadi pertimbangan kami,” kata Surahman dalam pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Ia menambahkan hubungan baik kedua negara sudah berlangsung sejak lama, tahun 1949. DPR secara khusus sudah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral - GKSBI Indonesia Italia dan mengirim delegasi untuk kunjungan persahabatan ke negara yang terkenal dengan Menara Pisa ini.

Politisi FPKS ini menyebut disamping Italia, 4 negara lain secara resmi sudah

menyatakan minat untuk posisi Sekjen Organisasi Parlemen Dunia ini. “Kamerun, Pakistan, Finlandia dan Belgia juga sudah menyebut nama kandidat. Semua juga sudah melobi DPR, jadi nanti kita pelajari dan dibicarakan dalam rapat BKSAP siapa yang patut kita dukung,” ungkapnya usai rapat.

Sebelumnya Dubes Italia menjelaskan Senator Barbara Debra adalah anggota parlemen yang aktif berkecimpung di IPU dan sejumlah organisasi internasional lainnya. “Pengalaman dan kepemimpinannya di IPU, LSM dan organisasi internasional di sejumlah negara sudah teruji,” paparnya.

Tingkatkan Investasi

Dalam pertemuan tersebut Federico memberikan apresiasi karena seorang pengusaha Indonesia sudah berhasil melakukan investasi cukup besar di Italia. “Pertumbuhan Indonesia sangat menarik perhatian bangsa Italia, apalagi sejak pengusaha Erick Tahir berinvestasi cukup besar di Klub Sepak Bola Inter Milan,” ujarnya.

Sejauh ini menurutnya minat pengusaha Italia untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga cukup baik. Perusahaan minyak dan gas bumi dari negaranya tercatat telah menanam investasi senilai 500 juta Euro di Pulau Karimun kemudian kerjasama Pirelli dengan PT. Astra senilai 100 juta Euro.

Ketua BKSAP juga mempromosikan sejumlah peluang investasi di Indonesia yang terbuka lebar bagi pengusaha Italia. “Pengusaha Erick Tahir juga wakil rakyat Indonesia yang sebagian besar mencintai bola. Kita harap investasi pengusaha Italia di Indonesia bisa ditingkatkan,” demikian Surahman. (iky), foto : andri/parle/hr.

RUU Penyandang Disabilitas Terus Dikaji

RUU tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih terus dikaji di DPR. RUU ini rencananya menjadi pengganti dari UU No.4/1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum terkini.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti saat menerima delegasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), menjelaskan, RUU yang masuk prioritas prolegnas itu, sudah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dan draf RUU sedang diperbaiki kembali untuk kemudian dikaji lagi.

“Draf RUU-nya sudah dikaji dengan mengundang beberapa pakar dari universitas-universitas terkemuka. Kemudian sudah pula mengadakan

diskusi melalui FGD-FGD. Dan tadi (aspirasi PPDI) yang disampaikan juga akan diakomodasi dan disampaikan kepada Dewan,” terang Win, sapaan akrab Sekjen DPR RI, usai menerima delegasi PPDI di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Sedianya, delegasi PPDI ini ingin bertemu dengan Pimpinan DPR RI atau Komisi VIII DPR. Namun, sulitnya mengatur waktu untuk bertemu dengan Pimpinan dan Komisi VIII, maka delegasi PPDI diterima langsung oleh Sekjen DPR. Berbagai keluhan para penyandang disabilitas disampaikan langsung kepada Sekjen DPR, sekaligus menyampaikan masukan untuk pembahasan RUU penyandang disabilitas.

Sekretariat DPR RI, lanjut Win,



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

juga akan memperhatikan berbagai fasilitas di gedung DPR ini untuk para penyandang disabilitas. Akses masuk dan berinteraksi di DPR untuk para penyandang disabilitas akan dibangun seiring amanat RUU ini bila sudah disahkan.

Sementara ketika ditanya soal ikutsertaan penyandang disabilitas dalam CPNS di DPR, Win menjawab, itu masalah kebijakan nasional. Rekrutmen pegawai baru lewat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan siapa pun bisa melamar dengan mengikuti seleksi. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Himpun Masukan RUU Keuangan Negara, Pansus Datangi Polri

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keuangan Negara, Pansus RUU Keuangan Negara menghimpun masukan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di Markas Besar Polri, dan diterima langsung oleh Kapolri Jenderal (pol) Sutarmanto dan jajarannya.

“Kunjungan ke Polri ini untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan negara, terutama tingkat kebocoran keuangan di Kepolisian. Kami ingin menyusun RUU ini lebih detail lagi. Selain itu, direncanakan kami juga akan mendatangi Kejaksaan Agung, KPK, dan BPK agar nanti ketika menyusun draft RUU ini, betul-betul sempurna,” jelas Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Achsanul Qosasi, di Jakarta, baru-baru ini.

Politisi Demokrat ini menegaskan, Tim Pansus ingin mengetahui secara detail tentang kebocoran anggaran yang sering terjadi, agar nantinya keuangan negara tidak diakali oleh para koruptor. Ia mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan oleh Kapolri.

“Dalam pertemuan, disampaikan oleh Kapolri, ada sejumlah kasus dengan modus operandi. Kapolri juga menyampaikan langkah-langkah dan usulan RUU ini, yang kira-kira dapat mencegah adanya tindakan kriminal yang merugikan negara. Kapolri memberikan masukan yang sangat bermanfaat, dan akan kami pertimbangkan untuk masuk ke dalam pasal-pasal di RUU. Ini rapat yang sangat produktif, dan teman-teman Pansus sangat mengapresiasi,” tambah Achsanul.



Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Achsanul Qosasi.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Pansus Bukhori. Ia mengapresiasi masukan dari Polri terkait dengan *Single Identity Number*. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan negara.

“Polri juga memberi masukan tentang pentingnya *Single Identity Number*. Ini menjadi salah satu upaya penyelesaian secara preventif dari segala sektor penyimpangan, penyimpangan terkait dengan masalah perpajakan, penyimpangan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), ini adalah hal-hal yang sangat mendasar,” jelas Bukhori.

Politisi PKS ini berharap, RUU dapat memberikan suatu *guide* yang besar, terkait dengan keuangan negara. Selain itu, dapat mencerminkan aspek preventifitas masalah-masalah penyimpangan keuangan negara, bukan hanya penindakan.

“Juga akan membentuk postur ke-

uangan negara itu. Selama ini sektor penerimaan keuangan negara itu kecil, maka dengan adanya UU Keuangan Negara ini, diharapkan penerimaan negara itu semakin besar,” tambah Anggota Komisi III ini.

Sejatinya, saat ini masih berlaku UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, masih ditemukan berbagai celah penyimpangan, sehingga muncul inisiatif dari DPR untuk merevisinya.

“Jadi ini memang merevisi UU yang sudah ada, yaitu UU No 17 tentang Keuangan Negara yang saat ini sudah *existing*. Karena kita melihat masih ditemukan kelemahan-kelemahan dalam UU ini, khususnya dalam penanganan penyimpangan keuangan. Karena masih ditemukan celah kelemahan seperti korupsi, sehingga mendorong DPR untuk merevisi UU ini,” ujar Bukhori.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Sutarmanto mengaku pihaknya telah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi berbagai penyelewengan keuangan negara. Di antaranya dengan tindakan preventif, represif, koordinatif, dan melibatkan peran serta masyarakat.

“Sistem pencegahan korupsi yang diterapkan sekarang belum diterapkan secara komprehensif, mengingat perbuatan korupsi sudah sangat kompleks dan terjadi di semua lini. Sistem yang diterapkan harus komprehensif, baik dari segi sistem, pengaturan dan struktur serta perlu adanya komitmen dari pemangku jabatan,” jelas Sutarmanto. (sf), foto: sofyan/parle/hr.

Peran Komisi DPR Lamban Respon Hasil Telaahan BAKN

Peran Komisi DPR dinilai lamban dalam merespon hasil telaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), bahkan dari 11 komisi baru 2 komisi yang sempat membuat Panitia Kerja (Panja) telaah BAKN untuk dibahas dengan

mitra kerjanya.

Demikian disampaikan Roy Salam, Deputy Indonesia Budget Center (IBC) dalam dengar pendapat umum dengan



Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso berjabat tangan dengan jajaran Deputy Indonesia Budget Center.

BAKN DPR yang dipimpin Ketuaanya Sumarjati Arjoso di Ruang rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Dalam makalahnya bertajuk Menggagas Perubahan BAKN Yang Lebih Kuat, Efektif Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara, Roy Salam lebih lanjut mengatakan, secara kuantitas SDM di BAKN saat ini untuk menelaah sekian banyak laporan hasil temuan BPK masih sangat kurang. “Dengan hanya 9 anggota BAKN dan 5 orang tenaga ahli harus memeriksa sekitar 1.800 laporan audit pertahun, bebannya cukup berat,” ujarnya.

Masukan Koalisi IBC termasuk didalamnya Peneliti Senior PSHK Ronald Rofiandri, selain sebagai masukan untuk penguatan BAKN juga sebagai masukan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Roy juga mengatakan bahwa BAKN belum mendapatkan kewenangan penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkannya kepada pemerintah.

Hambatan utama adalah terhadap Komisi yang memi-

liki konflik kepentingan. “Ini harus dipecahkan, misalkan dengan langsung meminta Pimpinan DPR memfasilitasi tindaklanjut rekomendasi BAKN,” tandas Roy.

Menanggapi masukan tersebut ditanggapi anggota BAKN Fahri Hamzah dan AW Thalib sependapat untuk meningkatkan peran BAKN yang lebih kuat dalam pengawasan keuangan negara. Meski demikian mereka berharap masukan dari IBC bisa dirumuskan lebih komprehensif sehingga bisa lebih mewarnai fungsi pengawasan DPR sesuai keinginan rakyat.

AW Thalib menambahkan, seharusnya BAKN lebih kuat dari yang diawasi. “Pengawasnya harus lebih pintar dari yang menganggarkan. Kita sudah mulai, lewat revisi RUU MD 3 kita letakkan harapan pada Pansus,” katanya dengan menambahkan penguatan itu tidak hanya untuk DPR tetapi juga DPRD yang hingga kini belum memiliki alat kelengkapan pengawas Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Pansus RUU MD3 menyatakan, revisi UU MD3 ingin mengubah falsafah dari Dewan di masa orde baru yang masih sangat kental dalam UU MD3. RUU MD3 tahun 2014 ini prinsipnya DPR harus lepas dari hal-hal yang menciptakan ruang untuk tidak transparan kepada konstituen. “Yang harus transparan adalah Dewan kepada publik, karena itu basisnya adalah individual, sehingga basis pemeriksaan dan penggunaan anggaran termasuk kewenangan harusnya pribadi,” katanya.

Ditambahkan, kalau mau menggunakan BPK sebagai instrumen yang melekat dengan parlemen, maka harusnya BAKN juga yang harus memilih anggota BPK. “Maka dalam revisi UU BPK, saya setuju jangan banyak politisi karena itu karir orang,” pungkas Fahri. (mp) foto: rizka/parle.

PK Berkali-kali Harus Diatur Ketat

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali bisa positif bagi para pencari keadilan. Namun disisi lain upaya itu bisa saja berpengaruh negatif dalam upaya menegakkan kepastian hukum.

“Dari sudut kepastian hukum putusan MK tersebut bisa membuat semakin tidak adanya kepastian hukum. Namun dari segi pencari keadilan ini akan semakin membuka peluang bagi pencari keadilan. Agar ada titik temu, keputusan MK tentang PK ini harus diatur dengan ketat,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/3/14).

Politisi FPD dari daerah pemilihan Jabar VI ini juga mengkhawatirkan

apabila putusan MK ini diterapkan akan muncul kondisi putusan hakim yang adil pun belum tentu akan memperoleh kepastian hukum. Pihak yang bersalah akan terus berupaya mengoreksi vonis yang telah ditetapkan mejelis.

Bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusul mengatakan DPR akan mengatur persyaratan pengajuan PK dalam pembahasan RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas bersama pemerintah. Baginya pengaturan itu penting karena putusan MK ini mungkin bisa dianggap adil dalam kasus Antasari tetapi jelas berbahaya apabila digunakan oleh mafia narkoba.

“Setiap hukuman mati pada nara-pidana narkoba bisa memunculkan PK biar tidak dihukum. Ini eksek yang



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono.

akan muncul,” ungkap politisi FPKS ini.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP yang diajukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. MK menyatakan pasal yang mengatur PK hanya boleh satu kali bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (iky) foto: iwan armanias/parle.



Wakil Bicara



Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno

“Utang Jamkesmas yang membengkak dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,8 triliun kepada RSUD di seluruh Indonesia, harus diselesaikan. Komisi IX DPR perlu memanggil Kemenkes, BPJS Pusat dan Kemenkeu untuk membuat terobosan sehingga hutang Jamkesmas ini bisa dibayar, kalau perlu dengan memanggil BPK. Jangan sampai program BPJS gagal gara-gara hutang belum dibayar hanya karena hambatan birokrasi.”

“Asuransi bencana sangat baik untuk mengatasi kekurangan dana negara dalam penanggulangan bencana yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tapi sampai sekarang usulan tersebut belum juga direalisasikan.”



Anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar



Anggota Komisi IX DPR Zulmiar Yanri

“Usia Harapan Hidup penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (diatas 76 th) merupakan tertinggi di Indonesia. Hal ini perlu dipertahankan, sebab menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli atas program-program kesehatan. Sebagai contoh, Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam, meski sudah cukup berusia, tetapi tetap terjaga kesehatannya, panjang umur dan produktif.”

Anggota DPR dan DPD Bentuk Kaukus Parlemen Desa

Mengingat luasnya perhatian dan harapan terhadap implementasi UU Desa agar sesuai dengan semangat dibentuknya UU ini, maka anggota DPR bersama DPD yang peduli Desa, memandang perlu membentuk Kaukus Parlemen untuk Desa

“Pembentukan Kaukus Parlemen Desa agar elemen-elemen parlemen yang menyusun UU Desa dapat lebih efektif dalam memantau penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Desa, sekaligus lebih mudah berkomunikasi dan berkontribusi dalam implementasinya,” kata Mantan Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam saat memimpin rapat pembentukan Kaukus Parlemen untuk Desa, di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (7/4).

Ia menambahkan, tujuan pembentukan Kaukus ini diantaranya demi menjamin substansi Peraturan Pemerintah



Mantan Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam.

dan Peraturan Pelaksana lain dari UU Desa tidak menyimpang dari substansi UU Desa, mempercepat implementasi UU Desa, menjamin aparat pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar mengenai substansi UU Desa, serta menjamin pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan anggaran.

Dikeempatan yang sama, anggota DPR Miryam S Haryani mengharapkan agar kaukus ini berbeda dengan kaukus lainnya, “Saya ingin kaukus memiliki ‘gaungnya’, untuk itu saya mengusulkan dibuat *blogspot* atau website tersendiri untuk kaukus ini, agar masyarakat bisa mengakses informasi, dan secara langsung kita (DPR-red) menjawabnya jika muncul pertanyaan,” tegasnya.

Selanjutnya menurut Totok Daryanto politis dari F-PAN, latar belakang dibentuknya Kaukus ini adalah adanya kekhawatiran dan ke ‘galauan’ substansi UU Desa tidak terrealisasikan dengan baik. “Ada kekhawatiran semua yang sudah kita perjuangkan dengan susah payah tidak terimplementasikan dengan baik, untuk itu, menurut saya seharusnya kaukus ini bisa menjadi ‘Anjing Penjaga’ UU Desa,” terangnya.

(nt) foto: nita/parle/iw.

Rancangan Anggaran DPR 2015 Rp 3,969 Triliun

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR telah menyusun rancangan anggaran DPR RI untuk tahun 2015 sebesar Rp 3.969.285.987.000. Besaran rancangan anggaran tersebut naik 23% dibanding tahun 2014 sebesar Rp 3.250.069.725.000.

Penjelasan ini disampaikan Wakil Ketua BURT Adjeng Ratna Suminar pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (6/3). “Besaran rancangan anggaran DPR RI tahun 2015 ini hanya 0,21% dari belanja negara dalam APBN tahun 2014. Rancangan anggaran tersebut terbagi dalam anggaran satuan kerja Dewan dan anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Laporan yang disampaikan Adjeng sebagai pimpinan BURT ini untuk mendapatkan penetapan di Rapat Paripurna DPR. Sebelumnya, seperti disampaikan Adjeng, usulan anggaran BURT tersebut sudah disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Setjen DPR.

“Penyusunan Anggaran DPR RI tahun 2015 mengacu pada arah kebijakan umum pengelolaan Anggaran DPR RI tahun 2015, sesuai Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR,” jelas Adjeng. BURT sendiri, lanjut Adjeng, telah menerima usulan kebutuhan anggaran 2015 dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Setjen DPR.



Wakil Ketua BURT DPR Adjeng Ratna Suminar saat menyampaikan Laporan BURT kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

“BURT bersama Setjen telah melakukan kompilasi dan sinkronisasi serta pembahasan atas usulan rancangan anggaran yang disampaikan oleh AKD dan Setjen pada tanggal 3 Maret 2014. Dari hasil pembahasan tersebut, BURT telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat konsultasi bersama Pimpinan Banggar dan Setjen pada tanggal 4 Maret 2014 untuk membahas usulan rancangan kegiatan dan ang-

garan DPR RI tahun 2014 yang diusulkan seluruh AKD dan Setjen tersebut,” papar Adjeng di hadapan Rapat Paripurna DPR.

Pada bagian lain, BURT juga melaporkan kegiatan DPR

untuk tahun 2015. Ada 67 pembentukan RUU yang diajukan AKD. RUU yang akan dibahas tahun depan adalah RUU usul inisiatif DPR sebanyak 26, RUU usul inisiatif pemerintah sebanyak 19, serta ratifikasi dan pemekaran 22 rancangan. (mh), foto: odjie/parle/hr.

Pimpinan Dewan Diminta Segera Tanda Tangani Surat Pemberhentian Dewas TVRI

Komisi I DPR mempertanyakan surat pemberhentian Dewan Pengawas TVRI yang tidak kunjung ditandatangani oleh Ketua DPR. Pasalnya, jika belum diterima tanggal 16 Maret, Keputusan tersebut akan batal.

“Ini sudah berdasarkan hasil observasi Komisi I DPR karena Dewas TVRI sudah beberapa kali melakukan pelanggaran selama masa bakti mereka, jadi kita sepakat menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian terhadap Dewas TVRI,” ujar anggota DPR Tantowi Yahya dari Partai Golkar, saat Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Kamis, (6/3).

Menurut Tantowi, keputusan pemberhentian sudah dilakukan secara masak dengan proses yang berlapis.



Anggota DPR Tantowi Yahya (F-PG).

“Sesuai mekanisme UU dan PP kami kemudian membuat rekomendasi Pemberhentian Seluruh Dewas LPP dan telah dikirimkan kepada pimpi-

nan,” terangnya.

Dia mengatakan, Pimpinan Dewan terkesan menghalangi-halangi proses pemberhentian Dewas Tersebut. “Surat pemberhentian sudah berada di meja pimpinan Dewan sebulan lalu, tetapi mengapa tidak segera ditandatangani, dan jika tidak maka akan menjadi pertanyaan besar dari Publik,” katanya.

Menurutnya, yang lebih tahu persoalan di Komisi tentunya hanya Komisi tersebut bukan pimpinan Dewan. “Jadi marilah kita menegakkan budaya otonomi Komisi jika telah diambil keputusan secara demokratis tentunya tidak boleh diambil alih oleh Pimpinan karena itu mengabaikan proses demokrasi,” ujarnya. (si) foto: iwan armanias/parle.

Tingkat Golput Perlu Diminimalisir

Pimpinan DPR berharap agar pada saat kampanye, semua peserta dan calon legislatif memperhatikan berbagai peraturan dengan tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rambu-rambu itu adalah, tidak memunculkan isu SARA dan tidak melakukan provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Di sisi lain, tingkat Golput perlu diminimalisir. “Rakyat harus diberikan pemahaman yang benar bahwa berpartisipasi memilih dalam pemilu, mereka akan ikut menentukan masa depan bangsa,” kata Ketua DPR Marzuki Alie ketika menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun 2013/2014 di depan Sidang Paripurna, Kamis (6/3).

DPR juga memperhatikan peri-

ngatan Bawaslu bahwa kerawanan pelanggaran yang sering terjadi dalam rangka pelaksanaan pemilu adalah potensi pencurian suara. Karena itu, kata Marzuki, Dewan mendorong Bawaslu terus menyempurnakan pemetaan dengan membangun tabulasi berbasis harian untuk semua TPS.

Bawaslu, harap Ketua DPR, harus mensosialisasikan pola identifikasi kerawanan di TPS kecamatan di seluruh Indonesia. DPR juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu 2014 demi terciptanya proses demokrasi bagi kemajuan bangsa.

Terkait dana saksi parpol, Marzuki menyatakan kita masih menunggu keputusan yang terbaik yang dapat diterima masyarakat dan peserta pemilu. Keberadaan saksi merupakan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

bagian tak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pemilu. “Masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencegah praktik kecurangan, sehingga pemilu berlangsung luber dan jurdil,” demikian Marzuki. (mp), foto: odjie/parle/hr.

Pemerintah Diminta Segera Atasi Bencana Asap di Riau



Anggota DPR Lukman Edy (F-PKB).

DPR mendesak pemerintah segera mengatasi bencana asap yang menimpa Riau dan sekitarnya. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Lukman Edy dari Fraksi PKB, saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Rabu (6/3).

Sudah hampir terjadi bencana alam asap selama satu

bulan lebih di Riau, dan sudah memakan korban anak-anak dan masyarakat yang terkena ISPA,” ujarnya

Sekarang ini, Menurutnya, bencana asap di Riau sudah mencapai daerah lain sehingga harus segera diatasi. “Bencana ini memiliki dua dimensi pertama bencana ini membahayakan masyarakat Riau dan di luar Riau, sementara dilihat sisi eksternal dapat mempengaruhi harkat dan martabat Indonesia jika asap tersebut memasuki negara lain. “Sepanjang tahun selalu ada bencana asap dan tidak pernah ada penegakan hukum bagi perusahaan besar yang membakar lahannya,” tambahnya.

Dia menambahkan, kita meminta pemerintah segera menegur secara keras dan serius serta merekomendasikan kepada pimpinan untuk menangannya.

Saat ini dilaporkan, kasus penyakit ispa dan lain-lain makin meningkat pada darurat bencana asap di Riau, Dilaporkan puluhan ribu orang terkena dampak bencana degan rincian penderita ispa 30.249, pneumonia 562, asma 1109, iritasi mata 895, iritasi kulit 1490. (si), foto: [odjie/parle/hr.](#)

Ketua DPR Lantik Dua Anggota Baru PAW

Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Sohibul Iman, Kamis (6/3) di Operation Room Gedung DPR, melantik dan mengambil sumpah dua anggota DPR baru pengganti antar waktu (PAW). Dua anggota tersebut adalah Mohamad Aly Yahya menggantikan Hikmat Tomet dari Partai Golkar, dan Bambang Suryadi menggantikan Taufik Kiemas dari PDI Perjuangan.

Pelantikan anggota FPG Mohamad Aly Yahya berdasarkan Keppres No.11/P tahun 2014 tertanggal 20 Februari 2014 dan pelantikan anggota FPDJ Perjuangan Bambang Suryadi berdasarkan Keppres No.12/P tahun 2014 tertanggal 24 Februari 2014.

Seusai pelantikan, Aly Yahya yang pernah menjadi anggota DPR periode 1997 sampai 2009 menyatakan bersyukur bisa masuk DPR lagi, meski pada periode 2009-2014 ini sudah berniat istirahat. “Ini bukan sekedar nikmat dan karunia, tetapi juga amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Sohibul Iman melantik dua anggota PAW.

sesuai sumpah yang saya ucapkan,” tegasnya.

Ia mengatakan, sumpah dan janji yang diucapkan itu bukan main-main, bukan hanya disaksikan manusia tetapi juga disaksikan Allah SWT. Meski

sisa waktunya tinggal hitungan bulan, politisi Partai Golkar ini mengatakan akan tetap mengabdikan dirinya sampai akhir bulan September. Apalagi sistem dan mekanisme kerja di DPR sudah baku, sehingga tinggal mengikuti irama saja. (mp), foto: [andri/parle/hr.](#)

Komisi I Setuju Reklamasi Bangunan Gudang Mesiu AL Tanjung Priok

Komisi I DPR menyatakan setuju untuk mereklamasi semua bangunan yang ada di lokasi ledakan gudang mesiu AL di Tanjung Priok. Pasalnya lokasi tersebut berada di tempat yang sangat strategis dalam kacamata pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan memang harus dipertahankan untuk masa depan.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanudin usai memimpin peninjauan ke lokasi ledakan mesiu di pangkalan AL Tanjung Priok, Kamis (6/3). Tim Komisi I DPR memang tidak bisa masuk ke lokasi terjadinya ledakan amunisi tersebut, sebab dibutuhkan waktu 3 hari untuk bisa meng-cooling down sisa-sisa bahan peledak.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, mengenai berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun kembali tempat tersebut, serta bagaimana kemampuan negara untuk membiayai, bisa dianggarkan dalam APBN-Perubahan.

Menurutnya, semua Fraksi di DPR sudah sepakat untuk segera melakukan upaya-upaya ini agar TNI Angkatan Laut khususnya Armada Barat bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

Sebelumnya, para wakil rakyat di Komisi I DPR menyatakan ikut belasungkawa atas meninggalnya satu orang prajurit, tiga orang kritis, delapan puluh tujuh luka-luka dalam peristiwa meledaknya amunisi di Markas Kopasaka Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dikatakan Hasanudin, gudang mesiu tersebut memang sudah tua peninggalan dari jaman Belanda yang digunakan untuk menyimpan amunisi, dan yang meledak memang bukan hanya amunisi ringan saja seperti pistol tetapi juga se-



Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanudin.

napan panjang.

“Yang terjadi *blasting* keatas dan kesamping dengan getaran yang cukup keras padahal di dalamnya ada TNT yang jumlahnya ratusan butir yang memicu terjadinya ledakan,” ujarnya.

Mengutip hasil penelitian tim ahli yang melakukan pengamatan, penyebab ledakan tersebut kemungkinan tidak ada sabotase, juga tidak ada kelalaian tetapi karena umur bunker yang sudah terlalu tua. Saat itu terjadi arus pendek dan menyebabkan panas kemudian temperatur didalam gudang menjadi tinggi, yang mengakibatkan kebakaran.

Upaya-upaya pemadaman sudah dilakukan oleh para prajurit tetapi kecepatan suhu yang tidak terkejar, sehingga prajurit yang berada di lokasi tersebut menjadi korban. (spy) foto:rizka/parle/iw.

BAKN Menanti Kelanjutan Proses Hukum Pengadaan Vaksin Flu Burung

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Sumarjati Aryoso kembali mengingatkan akan rekomendasi BAKN yang pernah disampaikan pada rapat paripurna 11 September 2012 silam. Dimana BAKN menilai adanya kerugian negara yang terjadi pada kasus pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2011. Diperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan dari program tersebut adalah sekitar

468,98 Miliar.

“Hal tersebut pernah kami (BAKN) sampaikan kepada Pimpinan DPR dan Komisi IX untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), namun sampai saat ini belum ada proses hukum yang signifikan yang dilakukan KPK terkait hal tersebut,” ungkap Sumarjati usai Sidang Paripurna, pekan lalu di Jakarta.

Dilanjutkan Politisi dari Fraksi Gerindra ini, salah satu temuan akan hal

itu contohnya adalah tidak ada alamat yang jelas terhadap rekanan. Sebelum menjadikan perusahaan tersebut mitra atau rekanan, Kementerian Kesehatan seharusnya betul-betul meneliti apakah perusahaan tersebut layak atau tidak.

Menurut Sumarjati, kasus yang sudah terlalu lama yaitu sejak tahun 2011 jika tidak segera dilanjutkan maka akan berdampak pada hilangnya barang bukti. Selain itu barang-barang yang sudah terbeli dalam program



Ketua BAKN DPR RI, Sumarjati Aryoso.

tersebut bisa saja rusak. Oleh karena itu ia meminta Pimpinan DPR dapat segera mendorong KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Zulmiar Yanri saat ditemui di

tempat terpisah mengatakan bahwa ia mendukung langkah hukum penyidikan kasus tersebut, baik oleh KPK maupun oleh Polri. Terhadap kasus tersebut Polri juga sudah menetapkan tersangka.

“Walau demikian Komisi IX ini kan sudah membentuk Panja Flu burung dan Panja itu belum selesai. Semua pihak seperti BAKN, BPKP, BPK, MABES POLRI kita sudah panggil dan sudah mengadakan kunjungan lapangan. Karena sudah dipegang kasusnya oleh Mabes Polri, tentu mabes polri harus menyelesaikannya hingga selesai terlebih dahulu,” jelas Zul, begitu politisi dari Fraksi Demokrat ini biasa disapa.

Namun terlepas dari masalah hukum tersebut, ia berpendapat sudah banyak aset yang di Biofarma yang sudah kadaluarsa dan tidak dipakai. Hal ini tentu sangat disayangkan. Padahal vaksin tersebut sangat dibutuhkan negara kita.

“Jadi kita berharap kasus hukum tetap berjalan, tetapi hal teknis yang sudah terlanjur tersedia atau terbeli dalam program tersebut tetap diperbolehkan digunakan. Kita melihat sisi manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Zulmiar kepada Parle. (Ayu), foto : iwan armanias/parle.

Dewan Khawatirkan Pendampingan Bagi Pemilih Tuna Netra

KPU memutuskan disiapkan pendamping bagi pemilih penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra pada Pemilu 2014. Hal tersebut dikhawatirkan selain hak politiknya hilang, juga dikhawatirkan hak politiknya disalahgunakan.

“Mayoritas mereka adalah pekerja informal, mereka bekerja mencari pekerjaan sendiri melatih dirinya sendiri artinya hak-hak dasar sebagai warga negara sudah banyak yang terdiskriminasi. Sudah selayaknyalah hak pilih ini kita perjuangkan bersama,” kata Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka saat Konferensi Pers bersama Forum Tuna Netra Menggugat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/3).

Pada pemilu 2014 ini, menurut Rieke, ada 1.754.689 penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia yang mendapatkan hak pilih dan sudah terdaftar. Namun yang menjadi persoalan adalah sampai hari ini belum ada kejelasan



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dan Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka saat Konferensi Pers dengan Forum Tuna Netra Menggugat.

bagaimana pemerintah menyiapkan surat suara bagi penyandang Disabilitas Tuna Netra ini.

“Sehingga walaupun mereka terdaftar kemungkinan mereka tetap tidak memilih. Dan kalau ini dihilangkan, kita khawatir selain hak politiknya

dihilangkan, juga khawatir hak politik mereka disalahgunakan,” tegas Rieke.

Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo yang turut hadir menyatakan bahwa pada prinsipnya sejak awal dirinya memberikan dukungan dengan kuat dan tegas kepada para penyandang

disabilitas untuk menggunakan haknya secara langsung.

“Dan sudah sejak lama juga, kita mendorong kepada KPU untuk membuat surat suara yang bisa digunakan oleh Tuna Netra secara langsung dan tidak perlu ada pendamping. Kecuali memang bagi mereka yang cacat dan lain sebagainya tidak bisa melakukannya sendiri, itulah yang kemudian diatur adanya pendamping,” papar Arif.

Namun, jelas Arif, bagi mereka yang sanggup menggunakan haknya seharusnya tidak boleh dihalangi. Inilah yang seharusnya diperhatikan KPU.

“Sebenarnya masih ada waktu yang cukup untuk 1.754.689 orang se-Indonesia kalau diverifikasi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota saya kira tidak terlalu banyak,” imbuhnya.

Untuk menjamin hak setiap hak warga negara yang notabene hak konstitusional, kata Arif, menggunakan hak pilihnya tidak boleh dihalangi kecuali orang yang memiliki

hak itu memang tidak hendak menggunakannya. Atau karena suatu hal dia membutuhkan orang lain adanya pendamping. Dan untuk teman-teman dari tuna netra ini harus disiapkan surat suara khusus atau templet.

“Kita mendukung satu juta persen apa yang diperjuangkan oleh teman-teman, dan kami akan menyampaikan kepada KPU untuk segera direspon dengan baik,” imbuhnya.

Sementara Hendar dari Forum Tuna Netra Menggugat menyampaikan bahwa dirinya bersama-sama kawan-kawan datang dari Bandung, ingin menyampaikan kabar duka cita bahwa hari ini dari sejak diputuskannya ketetapan KPU yang meniadakan alat bantu braille khususnya untuk teman-teman Tuna Netra yang dikenal dengan istilah templet, maka telah matilah hak kaum tuna netra khususnya.

“Kita sebagai warga negara yang mempunyai hak dasar yaitu berdemokrasi dan berpolitik, dengan ditiadakannya alat bantu tersebut artinya

secara langsung hilang hak untuk berdemokrasi,” papar Hendar.

Keputusan KPU bahwa untuk tuna netra boleh dilakukan pendampingan, menurutnya, sah-sah saja dilakukan apabila negara Indonesia ini masih sangat-sangat primitif. Namun Indonesia sudah 69 tahun merdeka, mengapa masih menganggap penyandang disabel seperti dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur penyandang cacat diharapkan untuk mandiri tidak ada ketergantungan pada orang lain.

“Tapi justru dengan kebijakan KPU melalui komisionernya tuna netra perlu didampingi ini sangat bertentangan, ini sudah melanggar azas Pemilu yaitu Luber. Ketika ada pendamping berarti tidak rahasia lagi,” tandasnya.

Hendar menyesalkan, mengapa KPU tidak berkoordinasi dulu dengan organisasi-organisasi penyandang cacat atau dengan kementerian yang mengurus penyandang cacat. (sc), foto: odjie/parle/hr.

Kasus Rusun Harus Menjadi Pembelajaran

Terjadinya kisruh yang terjadi di beberapa apartemen ataupun rumah susun di Jakarta, harus menjadi pembelajaran agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli hunian tersebut. Pasalnya, banyak penghuni yang sudah melaporkan kecurangan pengurus ataupun pengembang rusun kepada DPR RI.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima Pengurus Paguyuban Rusunami Kemanggisan Jakarta Barat, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, baru-baru ini.

“Berbagai kisruh rumah susun harus menjadi pembelajaran bahwa jual beli aset ataupun rumah yang belum dibangun, selalu menjadi masalah. Konsumen sudah bayar, tapi developer-nya tidak bertanggung jawab, bahkan

konsumen makin sulit mendapatkan hak kepemilikannya,” jelas Marzuki.

Politisi Demokrat ini menambahkan, akibat dari kecurangan ini, hak konsumen pun terabaikan. Berbagai kecurangan harus diungkap.

“Ini yang terjadi di Rusunami Kemanggisan, mereka sudah membayar lunas, tapi developer-nya tidak mampu membangun, akhirnya dipailitkan. Dampaknya, hak-hak penghuni yang terabaikan. Ada indikasi permainan, ini yang harus diungkap. Saya minta pengadilan dan kejaksaan untuk mengungkap hal ini, termasuk Mahkamah Agung,” jelas Marzuki.

Marzuki prihatin dengan kondisi yang menimpa konsumen Rusunami. Seharusnya, jika developer dipailitkan, konsumen tetap harus mendapatkan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

perlindungan.

“Dalam konteks jual beli bangunan yang belum jadi, seharusnya mendapatkan perlindungan utama. Jika sudah membayar lunas apartemen, kemudian pengembang mengalami kepailitan, sebagai pembeli harusnya mendapat hak utama untuk mendapatkan penggantian atau mendapat hak tinggal di apartemen tersebut jika kemudian dilanjutkan pembangunannya,” jelasnya.

Untuk itu, ia berjanji akan membantu apa yang menjadi permasalahan di Rusunami Kemanggisan. Ia akan mengawal proses pengajuan surat kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan.

“DPR, sebagai rumah rakyat, akan berusaha membantu. Tapi dalam koridor undang-undangan dan peraturan. Saya ingin menindaklanjuti ini, dan meneruskan surat mereka

(konsumen) kepada Kejaksaan. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap merugikan mereka, kita minta Kejaksaan untuk menindak. Yang kedua, mereka juga membuat surat kepada MA, patut kita kawal. Jangan sampai MA melakukan pembiaran terhadap hakimnya yang memang terbukti tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kita memfasilitasi semua, dalam koridor kewenangan DPR,” janji Marzuki.

Salah satu perwakilan paguyuban sebelumnya menjelaskan bahwa terjadi berbagai kejanggalan dalam proses kepaillitan developer. Diketahui, developer Rusunami Kemanggisan adalah PT Mitra Safir Sejahtera. Direktur PT MSS diduga menyelewengkan dana pembayaran dari 520 konsumen, yang mencapai nominal Rp 102 miliar lebih. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Kurang Sosialisasi, Program JKN Amburadul

Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, akhir bulan lalu. “Saya dengan terpaksa harus mengatakan bahwa persiapan pemerintah (Kemenkes) terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini “amburadul,” ujar anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi dengan raut muka kecewa.

Ia menambahkan, saat dirinya berkunjung ke Manado dan Jawa Timur, permasalahan yang muncul relatif sama, semua itu salah satunya karena kurangnya sosialisasi. Namun Zuber optimis bahwa suatu saat program JKN ini akan berjalan dengan baik, sehingga dirinya juga mengingatkan berbagai pihak agar jangan buru-buru mengatakan JKN gagal. “Ini menjadi pelajaran yang berharga, ketika ada program besar harus dilakukan sosialisasi secara gencar dan masif,” tandasnya.

Terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, Zuber melihat pada masa transisi ini menimbulkan banyak masalah. Di beberapa daerah banyak peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang kebingungan lantaran adanya informasi program tersebut sudah tidak berlaku sejak lahirnya BPJS Kesehatan. “Nah ini kan berbeda dengan yang disampaikan Pak Fahmi selaku Kepala BPJS Kesehatan pada saat RDP dengan Komisi IX, bahwa peserta Jamkesmas dan Jamkesda otomatis melebur ke BPJS Kesehatan. Proses transisi ini jangan sampai terjebak pada masalah administratif saja, karena aturan yang kurang jelas dari pusat dan masyarakat



Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi.

kat menjadi korban,” tukas Zuber.

Lebih lanjut Zuber mengharapkan agar prinsip pemerataan, kegotongroyongan dalam BPJS Kesehatan harus dipahami dan dijelaskan ke masyarakat. Dirinya pernah sampaikan hal tersebut ke Kementerian Kesehatan soal pentingnya sosialisasi alur dalam program JKN ini. Karena jika tidak paham maka akibatnya seperti sekarang ini masyarakat ramai-ramai berobat ke rumah sakit padahal mungkin sakitnya masih bisa ditangani di puskesmas.

Soal payung hukum kapitasi yang menjadi keluhan bersama, pemerintah katanya sedang mempersiapkan aturan hukumnya dalam bentuk perpres atau sejenisnya. Nah ini yang menjadi sorotan KPK dan mensinyalir BPJS Kesehatan punya potensi besar untuk korup. Karena dana yang mestinya untuk kesehatan, ternyata tidak sampai ke “puskesmas”. “Kalau tidak ada payung hukumnya nanti ditingkat pelayanan akan terganggu dan pemerintah daerah bisa terseret-seret

pada hal-hal yang tidak penting. Saya menghimbau kepada pemerintah (Kemenkes) untuk segera menerbitkan payung hukumnya,” katanya.

Terkait dengan tanggung jawab pemerintah akan ketersediaan obat, jangan dilihat hanya sebagai persoalan administratif saja, tetapi ketersediaan obat adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena di lapangan, masyarakat banyak mengeluhkan soal biaya obat yang jauh lebih banyak ketimbang saat ikut Jamkesmas.

Contoh terkini soal edaran Kemenkes tentang obat, yang dulunya dapat obat untuk 30 hari lalu hanya menjadi 7 hari, ketika komplain bermunculan dimana-mana maka keluarlah surat edaran Kemenkes itu. Kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan, komplain saja karena semua sedang dalam proses, dengan demikian diharapkan pemerintah merespon semua komplain itu dengan bijak. Kita jangan putus asa dengan pelaksanaan JKN ini, yakinlah pada saatnya BPJS Kesehatan akan berjalan dengan baik. Kepada masyarakat, semua pihak harus berani berteriak karena dengan adanya keluhan maka akan ada perbaikan.

Di lain pihak, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo, menengarai soal langka dan melambungnya harga obat ada kesan permainan dari perusahaan produsen obat. “Pemerintah pusat akan turun tangan dan menginventarisir obat apa saja yang mahal dan langka,” tukasnya. (oji), foto: odjie/parle/iw.

Persidangan Kasus Century Diharapkan Betul-Betul Tegakkan Keadilan

Digelarnya sidang kasus Century oleh Pengadilan Tipikor Kamis (6/3) diharapkan akan terlihat peranan tokoh yang sering disebut dalam rapat Timwas Century DPR dan pihak-pihak yang dianggap terlibat akan muncul ke permukaan. Diharapkan persidangan kasus Century akan berjalan jangan ada intervensi politik. Betul-betul persidangan untuk menegakkan keadilan, apalagi ditengarai akhir-akhir ini sudah ada *bail-out* jilid II, sekitar Rp 1,5 triliun.

“Ini sangat mengkhawatirkan, sebab akan menjadi kebiasaan. Setiap mau pemilu nanti ada *bail-out*, ini tentu tidak kita inginkan,” kata anggota DPR Nudirman Munir sesaat sebelum Sidang Paripurna DPR, baru-baru ini di gedung DPR.

Dia menegaskan, siapapun yang akan menjadi Presiden, hendaknya



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir.

hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Untuk itu, persidangan kasus Century dapat membuka kotak Pandora, hal-hal yang selama ini disembunyikan akan terungkap. Tak kalah penting, persidangan ini jangan sekedar menjadi panggung politik, sebaliknya akan betul-betul menegakkan hukum terhadap siapapun, sebab semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Meski nantinya melibatkan pimpinan negara, politisi Partai Golkar ini mengatakan, hukum tetap harus ditegakkan. Ditanya apakah dengan dimulainya persidangan kasus Century, Timwas akan tetap memanggil Boediono, Nudirman mengatakan sebetulnya pemanggilan itu dalam kerangka kerja Timwas. Sebab apa yang disampaikan Boediono selaku pribadi ada perbedaan yang sangat mencolok dan Timwas ingin klarifikasi. Faktanya Boediono tidak mau memenuhi panggilan Timwas Century.

“Tapi kita tunggu, bagaimana jalannya persidangan Budi Mulya kita lihat peranan Boediono sebagai Gubernur BI pada saat itu. Kalaupun tetap tidak hadir, DPR tentu akan menyiapkan langkah-langkah sebagaimana diatur konstitusi kita,” tegas Nudirman.

(mp,ar) foto:iwan armanias/parle.

Ketua DPR Panen Cabai di Kampar

Ketua DPR RI Marzuki Ali mengapresiasi perkembangan pertanian di Kabupaten Kampar. Marzuki melihat secara langsung berbagai terobosan dan perkembangan pertanian di Kabupaten tersebut. Hal itu diungkapkan setelah dirinya bersama Bupati Kampar Jefry Noer memanen cabe merah di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (8/3).

Kunjungan kerja Ketua DPR RI didampingi oleh Anggota DPR RI asal Riau Muhammad Nasir. Bupati Kampar Jeffry Noer selaku tuan rumah bersama Ketua PKK Kampar Eva Yuliana. Selain itu juga didampingi Walikota Pekanbaru Firdaus MT, Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono, jajaran Pemda dan tokoh masyarakat lainnya.

Selain memanen cabe merah di desa Rimbo Panjang, Marzuki dan rombongan melanjutkan kegiatan ke Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Peternakan Sapi Ruminansia untuk menyerahkan bantuan sapi gaduhan (bibit) kepada lima kelompok tani. Marzuki juga sempat meninjau lokasi sapi perah yang menjadi kawasan percontohan peternakan sapi.

Dalam sambutannya, politisi Partai Demokrat ini memberi semangat kepada para peternak sapi agar terus giat bekerja. “Tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih mau bekerja keras,” ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa selama ini DPR sudah bekerja keras untuk segera merampungkan Undang-undang (UU) yang pro rakyat.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memanen cabai dengan jajaran Pemda Kampar.

Seperti UU Desa yang belum lama disahkan, berpotensi menambah anggaran langsung sekitar Rp 700 juta per tahun tiap desa. Dana yang besar ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan di desa. “Harus disiapkan perangkat desa yang bersih dan memahami bagaimana cara menggunakan anggaran agar dana tersebut efektif membangun desa. Jika tidak hati-hati maka akan banyak kepala desa yang masuk penjara gara-gara tidak bisa mengelola anggaran yang besar tersebut,” demikian Marzuki mengingatkan. (oji) foto: odjie/parle/iw.



Usai pertemuan, Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti berfoto bersama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Selasa (4/3) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Kunjungan Kerja Tim Pansus RUU Panas Bumi DPR RI dipimpin Satya Widya Yudha ke kantor Gubernur Provinsi NTB, Kamis (27/2).Foto: Iwan Armanias/Parle.



Komisi I DPR RI kunjungi pangkalan TNI AL Tanjung Priok Jakarta Utara, terkait ledakan yang terjadi di gudang amunisi Komando Pasukan Katak TNI AL, dilanjutkan menjenguk para korban di RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat, Kamis (6/3). foto: Rizka/Parle.

